



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS 2018
KE PROVINSI SUMATERA UTARA TANGGAL 23-25 JULI 2017**

A. Latar Belakang

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 – 2017, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018, yaitu Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi. Secara spesifik, tugas Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas disebutkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i UU No. 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah “*mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun sebelum penetapan APBN. Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang harus sudah ditetapkan sebelum APBN Tahun 2018 yakni pada bulan Oktober 2017. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan agar setiap RUU yang sedang dan akan disusun serta dibahas oleh DPR mendapat masukan dari masyarakat sehingga setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2017. Penyerapan aspirasi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara di kota Medan.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas 2018 ke Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	A-273	FIRMAN SOEBAGYO., SE., MH	F.PG	KETUA TIM/WK. BALEG
2	A-489	TOTOK DARYANTO., SE	F.PAN	ANGGOTA/ WK BALEG
3	A-554	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO., SH., M.Hum	F.P HANURA	ANGGOTA/ WK BALEG
4	A-125	IRMADI LUBIS	F.PDIP	ANGGOTA
5	A-154	DIAH PITALOKA	F.PDIP	ANGGOTA
6	A-263	DADANG S. MUCHTAR	F.PG	ANGGOTA
7	A-274	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI., S.Ag., SH., MH	F.PG	ANGGOTA
8	A-342	ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO	F.P GERINDRA	ANGGOTA

9	A-452	Dr. Ir. BAHRUM DAIDO., M.Si	F.PD	ANGGOTA
10	A-464	H.A. BAKRI HM., SE	F-PAN	ANGGOTA
11	A-56	DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH	F.PKB	ANGGOTA
12	A-88	Dr. HERMANTO., SE., MM	F.PKS	ANGGOTA
13	A-510	H. MUHAMMAD IQBAL., SE., M.Com	F.PPP	ANGGOTA
14	A-36	SULAEMAN L. HAMZAH	F.P NASDEM	ANGGOTA
15	A-546	Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK., SH., MM., MH	F. PHANURA	ANGGOTA
16	-	MIEN USIHEN	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL BPHN	
17	-	LIBER SALOMO SILITONGA, S.Ip.	SEKRETARIAT	
18	-	NANIK SULISTYAWATI., SAP		
19	-	ACHMAD JAELANI		
20	-	RIFMA GHULAM DZALJAD., S.Ag., M.Si	TENAGA AHLI	
21	-	ADI SETIANI., SH., MH	TENAGA AHLI	
22	-	ANDRI TRIANA	TV PARLEMEN	
23	-	HILDA PISKA RANDINI	REPORTER	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara; Parlindungan Purba (Anggota DPD RI), Perwakilan Kadin, APINDO, GAPKI, APTI, dan AMTI Sumatera Utara, para Akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas HKBP Nommensen, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Perwakilan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

Wakil Gubernur Sumatera Utara [Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung]

❖ PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2018

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;

6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah.

❖ **Isu Aktual Provinsi Sumatera Utara:**

1. Tuntutan pemekaran wilayah baik ditingkat Provinsi maupun Kab/kota sampai wilayah Kec, Kel, dan Desa;
2. Krisis Listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik di wilayah Sumatera Utara;
3. Konflik Sumber Daya Alam diantaranya Tambang Emas PT. Agincourt Resources di Kab. Tapsel dan PT. Sorik Mas Mining di Kab. Mandailing Natal dengan Masyarakat sekitar lingkaran tambang;
4. Sengketa lahan yang terjadi di beberapa daerah, khususnya Eks HGU PTPN II merupakan potensi kerawanan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu;
5. Pelaksanaan eksekusi di Lahan Register 40 di Paluta yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dan bila dilaksanakan akan dpt menimbulkan konflik;
6. Masalah Imigran gelap dan keberadaan aliran sesat;

7. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sangat memprihatinkan yang melibatkan aparat penegak hukum.

❖ **Isu-Isu Strategis Wilayah serta Penyebab Isu (Prioritas Nasional & Daerah)**

No	Isu strategis	Penyebab
1	Belum sinerginya kebijakan, baik kebijakan sektoral, maupun kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah	<p>1. Masing-masing kebijakan dibangun secara sektoral, tanpa melibatkan pemangku kebijakan lainnya, al:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi UU 23/2014 ttg Pemda belum selaras dengan UU 33 & 17/2003 ttg Keuangan, UU 25/2004 ttg SPPN, serta UU sektoral lainnya; b. UU 23/2014 ttg Pemda belum memiliki turunan yang sejalan dengan UU sektoral lainnya <p>2. Pemerintah Pusat inkonsisten dalam pelaksanaan regulasi, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan agropolitan diubah menjadi kawasan pertanian; b. Penetapan kawasan hutan lindung dari Kementerian Kehutanan & LH; c. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak diiringi dengan ketersediaan dana.
2	Reformasi birokrasi dalam kaitan dengan Sistem Pemerintahan yang <i>Good Governance</i> , belum	<p>1. Pemerintah belum memiliki dan menjalankan SPM;</p> <p>2. Sistem <i>recruitment</i> Pemerintah</p>

	optimal	<p>Daerah belum baik dan belum dijalankan;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan masih rendah;</p> <p>4. Regulasi tentang keuangan daerah masih sulit diimplementasikan.</p>
3	Pelayanan birokrasi yang belum maksimal	SOP belum dilaksanakan sepenuhnya
4	Kondisi Infrastruktur	<p>1. Pembangunan infrastruktur belum terintegrasi;</p> <p>2. Masih ada daerah tertinggal (dampak bencana alam/gempa);</p> <p>3. Luas wilayah yang terlalu luas;</p> <p>4. Anggaran infrastruktur masih terpusat di pemerintah pusat, sementara panjang jalan yang terpanjang adalah kewenangan provinsi & kab/kota.</p>
5	Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran	<p>1. Masih tingginya inflasi bahan makanan pokok;</p> <p>2. Program penanggulangan kemiskinan masih belum sinergi antara K/L dan belum tepat sasaran;</p> <p>3. Sasaran hanya fokus pada persentase, seharusnya pada jumlah penduduk miskin;</p> <p>4. <i>Mismatch</i> antara pendidikan/pelatihan dengan</p>

		ketersediaan lapangan pekerjaan.
6	Masalah <i>Food, Energy, & Water Security</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan, akses dan distribusi pangan yang belum merata; 2. Ratio elektrifikasi masih rendah dan belum berkembangnya energi baru terbarukan; 3. Masih adanya <i>distrust</i> terhadap kualitas dan kualitas PDAM.
7	Menurunnya kinerja ekonomi nasional dan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya hilirisasi produk pertanian dan kelautan; 2. Belum berkembangnya UKM dan ekonomi kreatif; 3. Kualitas produk belum memenuhi SNI
8	Semakin menurunnya nilai-nilai kebangsaan, terutama generasi muda	Pengaruh glonbalisasi teknologi informasi dan komunikasi
9	Belum maksimalnya data satu, akurat dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya usaha untuk menuju satu data; 2. Masih adanya ego sektoral
10	Kualitas SDM yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang masih rendah; 2. Biaya pendidikan yang tinggi dan tidak terjangkau.

BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Saat ini Raperda Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara sudah dalam proses ditandatangani dan diundangkan oleh Gubernur.

SIBAS GINTING (GAPKI)

- Mendesak agar DPR segera mengundang RUU Perkelapasawitan agar industri sawit di Indonesia terjamin dan didukung secara nasional dan dapat berkompetisi di dunia internasional;
- Selain itu agar kutipan dana yang dialokasikan untuk subsidi biodiesel dapat kembali ke daerah terutama kepada para petani sebagai subsidi kebun/*replanting*;
- Banyak permasalahan di Sumatera Utara, salah satunya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, 26 perusahaan perkebunan di Sumatera Utara setelah keluarnya PP tersebut lahan perkebunannya menjadi di dalam hutan setelah sebelumnya berada di luar hutan.

PARLINDUNGAN PURBA (DPD RI)

DPD saat ini sedang menyusun RUU tentang energi baru terbarukan dan geologi.

MARULAM SIMANJUNTAK (Forum Komunikasi Umat Beragama)

Radikalisme sekuler yang ditekankan saat ini adalah radikalisme agama karena sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Selama ini hanya disebut 6 (enam) agama. Untuk itu kami harapkan Prolegnas 2018 dapat memasukan RUU Kerukunan Umat Beragama. Selain itu kami mengusulkan juga Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

JULIANDRI (APINDO)

Harga gas di Indonesia tertinggi di dunia karena distribusi dan tata kelola gas tidak sesuai dengan asas tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi. Migas adalah modal pembangunan bukan barang dagangan. Agar industri berjalan dan kompetitif, sebaiknya memperhatikan sektor-sektor sebagai berikut:

- Tata kelola migas yang baik;
- Jalan, jalan di sumut banyak yang rusak dan tidak ada yang bertanggung jawab antara kota, provinsi dan pusat;
- Upah, karena upah di Sumut tinggi sehingga investor banyak yang beralih ke Kamboja/Vietnam.

IRMADI LUBIS (DELEGASI BADAN LEGISLASI DPR RI)

Sumatera Utara harusnya fokus kepada revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

RUFINUS HOTMAULANA (DELEGASI BADAN LEGISLASI DPR RI)

Sumatera Utara banyak terjadi konflik pertanahan. Komisi II saat ini sedang melakukan pembahasan atas RUU Pertanahan bersama Pemerintah. Agar dapat diberikan masukan atas pengalaman di Sumatera Utara. Mengenai kerukunan beragama juga beririsan dengan RUU tentang Masyarakat Adat. Begitu juga dengan keinginan masyarakat untuk memajukan kepariwisataan di Sumatera Utara berhubungan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jalan banyak yang rusak juga menjadi perhatian kami karena saat ini RUU Jalan sedang disusun oleh Komisi V.

G. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Sumatera Utara mengusulkan:

1. RUU tentang Perkelapasawitan;
2. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. RUU tentang Kebebasan Umat Beragama;
4. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. RUU tentang Jalan;
7. RUU tentang Pertanahan;
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Beberapa RUU yang diusulkan memang telah menjadi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan akan menjadi Prioritas 2018, seperti:

- a. RUU Perkelapasawitan, RUU Minyak dan Gas Bumi saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi;
- b. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sedang menunggu paripurna untuk penetapan sebagai RUU usul inisiatif DPR;
- c. RUU tentang Pertanahan sudah dalam proses pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah;
- d. RUU tentang Jalan sedang diusulkan untuk perubahan Prolegnas 2017 oleh Komisi V;
- e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masih dalam proses penyusunan di Pemerintah.

9. Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2018:

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan sudah tercantum dalam Prolegnas 2015-2019);
- b. RUU tentang Kebebasan Umat Beragama (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perlindungan Umat Beragama).





ULOS: Wakil Gubernur Sumut H. Nurhajizah Marpaung dibagikan bersama Pimpinan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Ferman Soebagyo, usai diuji di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/7).

Parfi H Perfilma

MEIKAN: Proleksi Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki dan berbagai adat telah menjadi potensi yang bisa untuk meningkatkan industri kreatif, terutama di bidang perfilman. Karena itu, dengan kebijakan Peraturan Menteri Kebudayaan (Parfi) Sumut, maka diharapkan Sumut dapat makin dikenal hingga ke mancanegara melalui karya film dan seni yang diproduski.

"Kami yakin Sumut dan bangsa wilayah 70 ribu kilo meter persegi, kebudayaan alam berbagai adat istiadat, seni dayanya, dapat menjadi daya inspirasi yang bisa Parfi" ujar H. Sekelapen (Sumut) Hukones, Wakil Ketua Pelaksana Pery Parfi Sumut Periode 2017 di Gedung Rina Gembira, (22/7) kemarin.

Terdahulu, Ketua Unit Parfi Felayati Adhitya Parfi Sumut, Marialdi Tubing, Direktur Badan dan Dana Tolak Bontot Jontak, Wakil Bupati Mandailing Natal pengarah dan anggot Sumut.

Lebih lanjut H. Sekelapen, Pemerintah Provinsi Sumut dapat meningkatkan di Sumut dapat sentral masyarakat dan masyarakat. Apdi Dharau Tolak Bontot Jontak, Wakil Bupati Mandailing Natal pengarah dan anggot Sumut bisa dan paten.

Serap Aspirasi Prolegnas dari Masyarakat Baleg DPR RI Kunjungi Sumut

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 23-25 Juli 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Sumut, terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2018.

"KUNJUNGAN kerja kami ke sini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk Prolegnas RUU Prioritas 2018. Hal ini merupakan penting bagi kami, karena ini merupakan masalah baru yang diberikan pada Baleg sesuai dengan amanat UU. Kami harus memodifikasi ke dalam bentuk dengan RUU atau dengan UU yang sudah ada sebelumnya," tutur Pimpinan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Ferman Soebagyo, usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/7).

Terdahulu Wakil Gubernur Sumut H. Nurhajizah Marpaung, tim dari Baleg DPR RI, yakni Totok Daryanto, Donyo Iskandar F, Irmah Lubis, Deleang S Machitar, Ayo P Djaja Budikusuma, Tadijil Nohadil, Hermawan, M Iqbal Selwanari, Harisah, Bahriah HJ Ibtisamah, Endang Marita, Diah Pitakoka, yang juga didampingi anggota Baleg DPR RI dan So-

maud Parliadangan Tabu, wam-lebchitasakaderrika dari beberapa kelompok di Sumut, Apinda Gagik, FKUB, tokoh masyarakat, dan lainnya.

Lebih lanjut Ferman mengatakan, saat ini Baleg sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018. Dalam rangka menyiapkan Prolegnas ini, Baleg melakukan pertemuan musyawarah dengan masyarakat, baik yang menyempatkan secara langsung dengan datang, atau diundang ke 14 RW, maupun yang menyempatkan secara tidak langsung melalui surat.

"Selain itu, kami juga menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dengan menggelar kunjungan kerja untuk mendengar dan mendengarkan dari masyarakat di daerah. Selain ke Sumut, kami juga ke provinsi lain, seperti Sulawesi Utara," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ferman juga mengatakan, yang telah dibentuk tim khusus dari daerah ada sebanyak 49 prolegnas RUU

Prioritas, dan 11 RUU lainnya akan dibuka. Di antaranya merupakan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (di dalam Prolegnas 2015-2019), RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah), RUU tentang Melayak Gas dan Biogas, hingga RUU Perkotaan lainnya.

"Masuk yang kami peroleh dari daerah ini, diharapkan bisa mempengaruhi perubahan. Sebab, sekarang sudah terasah di daerah, sehingga untuk menyetujui UU harus melalui daerah. Kalau kalau terjadi masalah akibat UU yang telah disahkan, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Itulah perlunya kami menyempatkan daerah," jelasnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumut, H. Nurhajizah Marpaung mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut juga akan memperhatikan aspirasi masyarakat di Baleg DPR RI dan So-

Wakil Gubernur Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan



DABADIK Ketua Par

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 ke Provinsi Sumatera Utara. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JULI 2017

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
KE PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA TIM,

FIRMAN SOEBAGYO

A-273